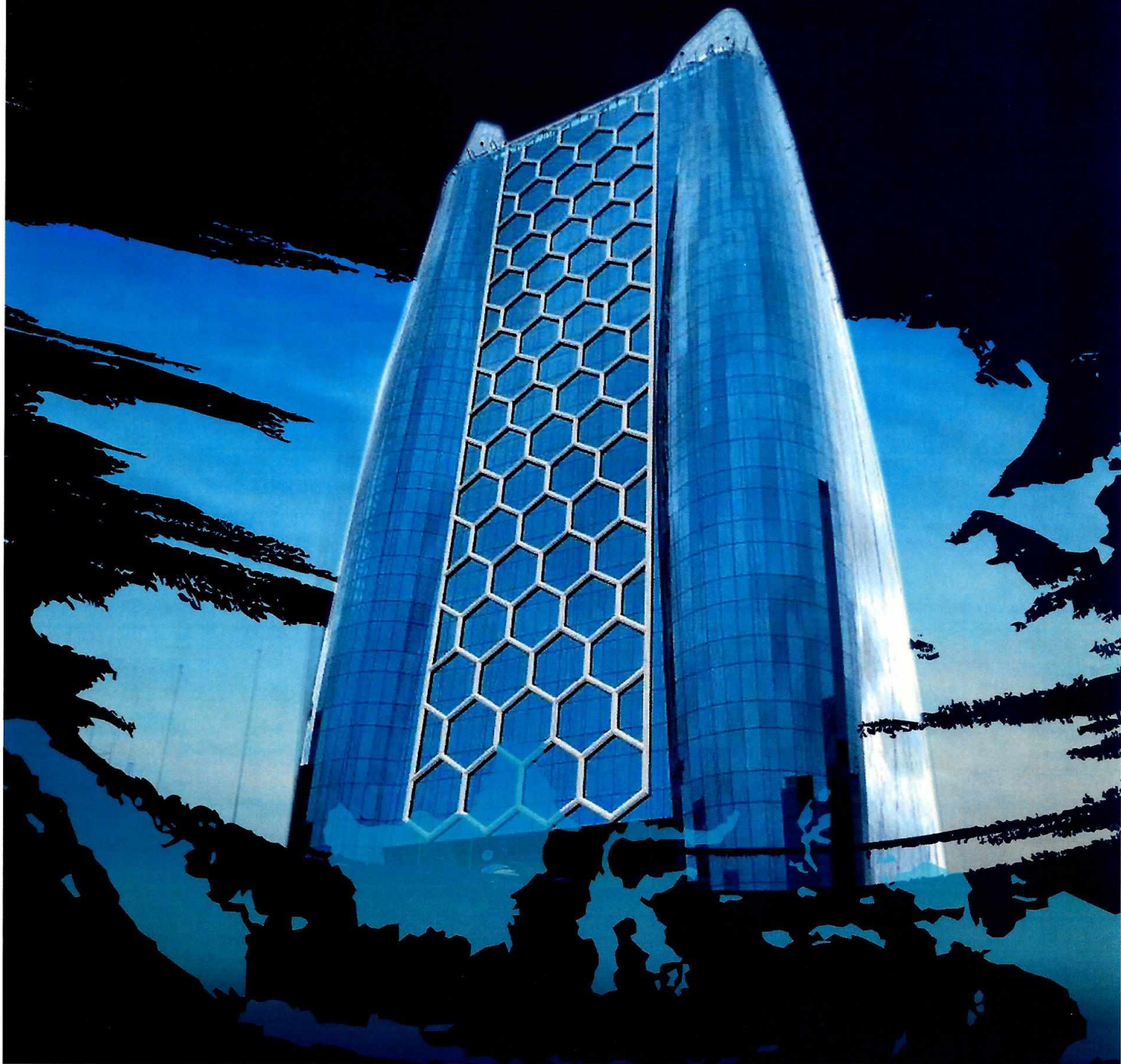


LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041 AUDITED TAHUN ANGGARAN 2020

KEMENTERIAN BUMN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian BUMN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	5
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	6
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
III. NERACA.....	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
A. PENJELASAN UMUM	12
1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN	12
2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
3. BASIS AKUNTANSI	14
4. DASAR PENGUKURAN	14
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
1. PENDAPATAN	21
2. BELANJA.....	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	26
1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	26
2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	26
3. Piutang Bukan Pajak.....	27
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	29
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	29
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	29
7. Persediaan	30
8. Tanah	30
9. Peralatan dan Mesin	30
10. Gedung dan Bangunan	32
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
12. Aset Tetap Lainnya	34
13. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	34
14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36

15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	37
16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	37
17. Aset Tak Berwujud	38
18. Aset Lain-lain	42
19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
20. Utang Kepada Pihak Ketiga	43
21. Pendapatan Diterima Dimuka	44
22. Ekuitas	45
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	46
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	46
2. Beban Pegawai	47
3. Beban Persediaan	47
4. Beban Barang dan Jasa	48
4) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	50
5. Beban Pemeliharaan	50
6. Beban Perjalanan Dinas	51
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	52
9. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	52
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	54
1. Ekuitas Awal	54
2. Surplus (Defisit) LO	54
3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	54
4. Transaksi Antar Entitas	54
5. Ekuitas Akhir	55
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	56
1. Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN)	56
2. Data Tuntutan Hukum	57
3. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara	58
4. Dampak Pandemi Covid-19	59
5. Hibah Lampu dan Ornamen Masjid Ar-Rayyan Kementerian BUMN	60
6. Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara dari Barang Rampasan Negara	60
7. Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan	61
8. Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan	61



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA


ERICK THOHIR

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.337.874.123.

Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp260.130.543.993 atau mencapai 97,65% dari alokasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp266.392.551.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.971.485.689.497 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.296.042.605, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.960.584.173.759, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp28.099.544 dan Rp6.577.373.589.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.615.946.629 dan Rp1.961.869.742.868.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.095.990.478, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp179.872.056.906 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(175.776.066.428).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(357.006.971) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(176.133.073.399).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.860.229.141.715, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(177.151.026.621), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp493.278.682 dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp277.280.395.870, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.961.869.742.868.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
 (DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CATT.	2020			2019			% REAL. ANGG.	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.									
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA		0	8.337.874.123	8.337.874.123	0,00	4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	8.337.874.123	8.337.874.123	0,00	4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	
A.1.2	HIBAH		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A. II)		0	8.337.874.123	8.337.874.123	0,00	4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	
B	BELANJA NEGARA	B.2.									
B.1.1	Rupiah Murni		266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65	208.269.902.000	202.523.377.661	(5.746.524.339)	97,24	
B.1.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	58.085.663.000	57.640.218.705	(445.444.295)	99,23	58.358.323.000	57.738.232.224	(620.090.776)	98,94	
B.1.1.b	Belanja Barang	B.4.	102.977.435.000	97.614.016.856	(5.363.418.144)	94,79	134.885.923.000	129.812.902.846	(5.073.020.154)	96,24	
B.1.1.c	Belanja Modal	B.5.	105.329.453.000	104.876.308.432	(453.144.568)	99,57	15.025.656.000	14.972.242.591	(53.413.409)	99,64	
	JUMLAH BELANJA (B.1 + B. II)		266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65	208.269.902.000	202.523.377.661	(5.746.524.339)	97,24	



Jakarta, 03 Mei 2021
 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt.	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	2.782.486.208	601.380.961	2.181.105.247	362,68
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	32.017.185	379.285.240	(347.268.055)	(91,56)
Piutang Bukan Pajak	C.3	344.307.437	366.556.424	(22.248.987)	(6,07)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(41.709.952)	(108.215.814)	66.505.862	(61,46)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		302.597.485	258.340.610	44.256.875	17,13
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.000	3.500.004	(4)	(0,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.482.500	3.482.504	0	0,00
Persediaan	C.7	1.175.459.227	1.731.275.125	(555.815.898)	(32,10)
JUMLAH ASET LANCAR		4.296.042.605	2.973.764.440	1.322.278.165	44,46
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.468.058.953.000	1.448.189.807.000	19.869.146.000	1,37
Peralatan dan Mesin	C.9	107.900.878.431	125.125.261.746	(17.224.383.315)	(13,77)
Gedung dan Bangunan	C.10	400.689.725.717	396.488.627.387	4.201.098.330	1,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	7.706.388.680	3.201.056.420	4.505.332.260	140,75
Aset Tetap Lainnya	C.12	1.066.410.162	1.066.410.162	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	68.862.035.362	1.647.770.000	67.214.265.362	4079,10
Akumulasi Penyusutan	C.14	(93.700.217.593)	(120.240.627.104)	26.540.409.511	(22,07)
JUMLAH ASET TETAP		1.960.584.173.759	1.855.478.305.611	105.105.868.148	5,66
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	28.240.748	28.964.410	(723.662)	(2,50)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	(141.204)	(144.822)	3.618	(2,50)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		28.099.544	28.819.588	(720.044)	(2,50)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		28.099.544	28.819.588	(720.044)	(2,50)
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.17	23.281.538.648	23.246.192.650	35.345.998	0,15
Aset Lain-lain	C.18	50.942.645.557	151.433.500	50.791.212.057	33540,27
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(67.646.810.616)	(18.268.348.059)	(49.378.462.557)	270,30
JUMLAH ASET LAINNYA		6.577.373.589	5.129.278.091	1.448.095.498	28,23
JUMLAH ASET		1.971.485.689.497	1.863.610.167.730	107.875.521.767	5,79
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	2.468.333.417	102.881.340	2.365.452.077	2299,20
Pendapatan Diterima Dimuka	C.21	7.147.613.212	3.278.144.675	3.869.468.537	118,04
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		9.615.946.629	3.381.026.015	6.234.920.614	184,41
JUMLAH KEWAJIBAN		9.615.946.629	3.381.026.015	6.234.920.614	184,41
EKUITAS					
Ekuitas	C.22	1.961.869.742.868	1.860.229.141.715	101.640.601.153	5,46
JUMLAH EKUITAS		1.961.869.742.868	1.860.229.141.715	101.640.601.153	5,46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.971.485.689.497	1.863.610.167.730	107.875.521.767	5,79

Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATT	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.095.990.478	4.607.618.739	(511.628.261)	(11,10)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		4.095.990.478	4.607.618.739	(511.628.261)	(11,10)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.095.990.478	4.607.618.739	(511.628.261)	(11,10)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	57.684.364.855	57.720.486.671	(36.121.816)	(0,06)
Beban Persediaan	D.3	2.302.075.427	3.004.863.573	(702.788.146)	(23,39)
Beban Barang dan Jasa	D.4	70.751.947.107	76.714.908.814	(5.962.961.707)	(7,77)
Beban Pemeliharaan	D.5	8.438.185.133	4.950.367.928	3.487.817.205	70,46
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.402.379.216	41.313.124.922	(23.910.745.706)	(57,88)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	23.359.614.648	20.526.180.692	2.833.433.956	13,80
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(66.509.480)	(336.736.601)	270.227.121	(80,25)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		179.872.056.906	203.893.195.999	(24.021.139.093)	(11,78)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(175.776.066.428)	(199.285.577.260)	23.509.510.832	(11,80)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	10.462.600	(10.462.600)	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	(10.462.600)	10.462.600	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		64.612.222	223.068.055	(158.455.833)	(71,03)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		421.619.193	173.715.774	247.903.419	142,71
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(357.006.971)	49.352.281	(406.359.252)	(823,38)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(357.006.971)	38.889.681	(395.896.652)	(1.018,00)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(176.133.073.399)	(199.246.687.579)	23.113.614.180	(11,60)

Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**ERICK THOHIR**

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	1.860.229.141.715	560.895.704.225	1.299.333.437.490	231,65
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(176.133.073.399)	(199.246.687.579)	23.113.614.180	(11,60)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	493.278.682	1.305.579.958.345	(1.305.086.679.663)	(99,96)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0	1.310.039.462.883	(1.310.039.462.883)	100,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	521.561.602	(4.487.063.792)	5.008.625.394	(111,62)
LAIN-LAIN	E.3.5	(28.282.920)	27.559.254	(55.842.174)	(202,63)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	277.280.395.870	193.000.166.724	84.280.229.146	43,67
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		101.640.601.153	1.299.333.437.490	(1.197.692.836.337)	(92,18)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.961.869.742.868	1.860.229.141.715	101.640.601.153	5,46

Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian BUMN bertransformasi dari unit eselon II di Kementerian Keuangan (1973-1993) menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (1993-1998) lalu menjadi Kementerian BUMN pada tahun 1998. Kementerian BUMN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sejalan dengan pembentukan kabinet pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri I dijabat oleh Sdr. Pahala Nugraha Mansury;
- b. Wakil Menteri II dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;
- c. Sekretariat Kementerian dijabat oleh Sdr. Susyanto;
- d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dijabat oleh Sdr. Carlo B. Tewu;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Alex Denni;

- f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Sdri. Nawal Nely;
- g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis dijabat oleh Sdr. Warih Sadono;
- h. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;
- i. Staf Ahli Bidang Industri dijabat oleh Sdr. Rabin Indrajad Hattari.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Menteri BUMN telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha milik negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 terdiri dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui Renstra Kementerian BUMN 2020-2024, diharapkan BUMN akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja

di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 sudah tersusun dan telah ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMAK-BMN digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Selain mengelola DIPA BA 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Investasi Pemerintah) dan DIPA BA 999.07 (Belanja Subsidi) yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian BUMN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014, penyisihan piutang tak tertagih didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

	Negara/DJKN	
--	-------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D dan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk didalamnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp345.832.707.000. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, Kementerian BUMN telah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi DIPA dari DIPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja, optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja, penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Perubahan pagu anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	60.440.627.000	58.085.663.000
Belanja Barang	174.204.767.000	102.977.435.000
Belanja Modal	111.187.313.000	105.329.453.000
Jumlah Belanja	345.832.707.000	266.392.551.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	31 Desember 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	259.435.066.000	220.856.115.000
Program Pembinaan BUMN	86.397.641.000	45.536.436.000
Total Belanja	345.832.707.000	266.392.551.000

Perubahan nilai DIPA tersebut diatas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.337.874.123. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	8.158.124.225	100,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	113.583.237	100,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17.265.240	100,00
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44.654.182	100,00
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.676.000	100,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	571.239	100,00
	Total	0	8.337.874.123	100,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 secara total mengalami penurunan sebesar 12,45% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan 2019. Hal tersebut disebabkan adanya akun yang mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu akun penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta akun penerimaan kembali belanja modal TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31/12/2020	31/12/2019		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.158.124.225	7.637.115.403	521.008.822	6,82
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	5.000.000	(5.000.000)	(100,00)
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	113.583.237	82.263.889	31.319.348	38,07
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.265.240	68	17.265.172	2.538
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	44.654.182	174.264.137	(129.609.955)	(74,38)
6	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	3.676.000	1.624.567.440	(1.620.891.440)	(99,77)
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	571.239	0	571.239	100,00
	Total	8.337.874.123	9.523.210.937	(1.185.336.814)	(12,45)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp8.158.124.225 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruang, Listrik dan Air dari *tenant* yang menyewa gedung dan bangunan Kementerian BUMN senilai Rp8.158.124.225 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Teenant	Pembayaran Ruang	Pembayaran Air	Pembayaran Listrik	Total
Koperasi Prabunara	196.125.000	47.572.639	43.922.290	287.619.929
PT BNI, Tbk	1.258.921.000	856.549	130.695.773	1.390.473.322
PT BRI, Tbk	5.653.110.000	693.559	140.809.037	5.794.612.596
PT Pos Indonesia	42.498.000	0	10.175.477	52.673.477
PT Telkomsel	0	0	31.017.158	31.017.158
PT XL Axiata	0	0	22.128.415	22.128.415
PT Bank Mandiri, Tbk	244.886.704	0	6.776.035	251.662.739
PT Nitraya Bimasakti	167.994.000	7.748.468	34.989.192	210.731.660
PT BTN, Tbk	0	0	5.814.562	5.814.562
PT Danareksa	0	0	4.472.740	4.472.740
Piutang Bakrie	106.917.627	0	0	106.917.627
Total	7.670.452.331	56.871.215	430.800.679	8.158.124.225

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp113.583.237 terdiri atas:
 - Denda keterlambatan penyelesaian pembayaran sewa ruangan atas nama PT BRI (Persero) Tbk, sebesar Rp113.062.200;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama PT Maju Lancar Jaya sebesar Rp75.042;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama PT Andira Karya Persada sebesar Rp445.995.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp17.265.240 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp44.654.182 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu antara lain berupa pengembalian honorarium tim, PPNPN, dan konsinyering.
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp3.676.000 yaitu penyetoran kembali selisih volume pekerjaan yang sudah terbayarkan untuk pekerjaan pengadaan ruang kantin VIP atas nama PT Permata Graha Nusantara.
6. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp571.239 merupakan potongan pembulatan SPM pada tahun anggaran 2020.

2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp260.130.543.993 atau 97,65% dari anggaran belanja sebesar Rp266.392.551.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 tersaji sebagai berikut:

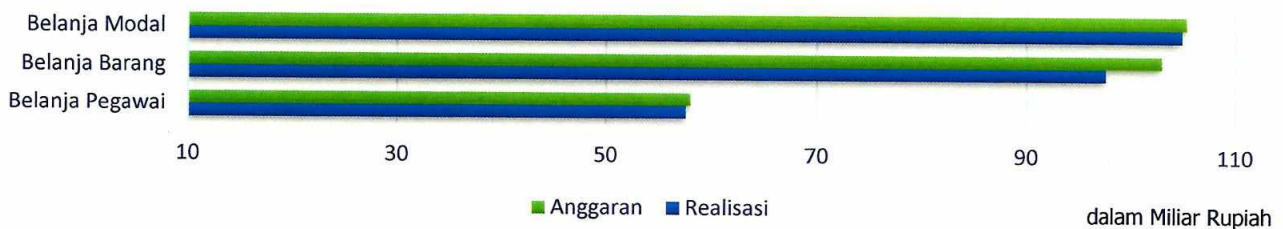
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja	Per 31 Desember 2020		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	58.085.663.000	57.750.686.410	99,42
2	Belanja Barang	102.977.435.000	97.748.690.621	94,92
3	Belanja Modal	105.329.453.000	104.876.308.432	99,57
	Total Belanja Kotor	266.392.551.000	260.375.685.463	97,74
	Pengembalian Belanja		(245.141.470)	
	Jumlah	266.392.551.000	260.130.543.993	97,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Program	Per 31 Desember 2020		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	220.856.115.000	215.730.093.749	97,68
2	Program Pembinaan BUMN	45.536.436.000	44.400.450.244	97,51
	Jumlah	266.392.551.000	260.130.543.993	97,65

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp57.640.218.705 dan Rp57.738.232.224. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Penurunan ini disebabkan pemberian THR tahun 2020 hanya meliputi komponen Gaji Pokok dan tidak diberikan kepada PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada nilai pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020, terdapat kesalahan penyetoran

atas pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 yang disetorkan sebagai pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 senilai Rp21.920.900. Kesalahan penyeteroran tersebut berdampak pada penambahan pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.436.296.746	22.593.390.639	1.842.906.107	8,16
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.399.266.506	575.102.255	824.163.951	143,31
3	Belanja Lembur	0	0	0	0,00
4	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	31.915.123.158	34.587.787.348	(2.672.664.190)	(7,73)
	Jumlah Belanja Kotor	57.750.686.410	57.756.280.242	(5.593.832)	(0,01)
	Pengembalian Belanja Pegawai	(110.467.705)	(18.048.018)	(92.419.687)	
	Total	57.640.218.705	57.738.232.224	(98.013.519)	(0,17)

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp97.614.016.856 dan Rp129.812.902.846. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 24,80% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pola kegiatan kerja yang banyak dilakukan secara *remote* atau dalam jaringan sesuai perubahan tatanan aturan baru berkenaan pandemi Covid-19. Pada nilai pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2020, terdapat kesalahan penyeteroran atas pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 yang disetorkan sebagai pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 senilai Rp30.642.336. Kesalahan penyeteroran tersebut berdampak pada penambahan pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2020.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Barang Operasional	10.561.208.260	11.283.838.062	(722.629.802)	(6,40)
2	Belanja Barang Non Operasional	13.038.807.435	22.178.987.383	(9.140.179.948)	(41,21)
3	Belanja Barang Persediaan	2.188.369.286	4.194.262.444	(2.005.893.158)	(47,82)
4	Belanja Jasa	44.138.620.462	45.931.174.418	(1.792.553.956)	(3,90)
5	Belanja Pemeliharaan	8.907.986.642	4.567.630.617	4.340.356.025	95,02
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.232.045.186	41.419.049.462	(25.187.004.276)	(60,81)
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	591.240.263	300.841.000	290.399.263	96,53
8	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	430.402.427	0	430.402.427	100,00
9	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.297.400	0	32.297.400	100,00
10	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.086.432.690	0	1.086.432.690	100,00
11	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	541.280.570	0	541.280.570	100,00
	Jumlah Belanja Kotor	97.748.690.621	129.875.783.386	(32.127.092.765)	(24,74)
	Pengembalian Belanja Barang	(134.673.765)	(62.880.540)	(71.793.225)	
	Total	97.614.016.856	129.812.902.846	(32.198.885.990)	(24,80)

Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp2.087.488.087 atau 53,22% dari anggaran sebesar Rp3.922.479.000 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	649.609.000	430.402.427	66,26
2	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	141.042.000	32.297.400	22,90
3	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.345.476.000	1.086.432.690	46,32
4	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	786.352.000	541.280.570	68,83
	Jumlah Belanja Kotor	3.922.479.000	2.090.413.087	53,29
	Pengembalian Belanja		(2.925.000)	
	Total	3.922.479.000	2.087.488.087	53,22

Realisasi belanja barang penanganan pandemi Covid-19 diantaranya meliputi biaya uji swab PCR bagi pegawai, biaya penggantian komunikasi (paket data), honorarium narasumber, serta penggantian biaya transportasi bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan *work from office*.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp104.876.308.432 dan Rp14.972.242.591. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 600,47% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan kenaikan pada pos belanja modal gedung dan bangunan antara lain pembayaran pekerjaan Renovasi Konstruksi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp65.723.483.613, serta kenaikan pada pos belanja modal peralatan dan mesin antara lain Peningkatan Virtualisasi Network untuk Mendukung High Availability Kementerian BUMN sebesar Rp7.404.017.955.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.117.058.496	8.592.697.050	10.524.361.446	122,48
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.759.249.936	5.501.038.641	80.258.211.295	1.458,96
3	Belanja Modal Lainnya	0	878.506.900	(878.506.900)	(100,00)
	Jumlah Belanja Kotor	104.876.308.432	14.972.242.591	89.904.065.841	600,47
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	
	Total	104.876.308.432	14.972.242.591	89.904.065.841	600,47

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.782.486.208 dan Rp601.380.961 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Belanja Barang Dibayar Dimuka			
No	Jenis	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Pembayaran Voucher BBM	14.050.000	6.700.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i> dan <i>Antivirus</i>	1.999.984.225	594.680.961
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	91.499.999	0
Total		2.105.534.224	601.380.961

Selain Belanja Barang Dibayar Dimuka tersebut diatas, Kementerian BUMN juga melakukan pencatatan atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kementerian BUMN yang telah dilakukan pembayaran 100% namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 belum terselesaikan. Nilai sisa pekerjaan yang belum terselesaikan adalah sebesar 1,03% atau sebesar Rp676.951.984 yang kemudian dicatat sebagai Belanja Modal Dibayar Dimuka.

(Dalam Rupiah)

Belanja Modal Dibayar Dimuka			
No	Jenis	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Pekerjaan Renovasi Gedung Kementerian BUMN yang Tidak Selesai 100% per 31 Desember 2020	676.951.984	0
Total		676.951.984	0

2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp32.017.185 dan Rp379.285.240. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya sampai dengan tanggal periode pelaporan. Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp32.017.185 terdiri atas:

1. Kelebihan Pembayaran Honorarium PPNPN TA. 2020 sebesar Rp96.075;
2. Pengembalian Pembayaran Belanja Barang berupa Belanja Bahan (Konsumsi/Jamuan) sebesar Rp8.201.110;
3. Pengembalian honorarium narasumber an. G.E.P. sebesar Rp9.520.000;
4. Pengembalian honorarium narasumber an. D.P. sebesar Rp6.800.000;
5. Pengembalian honorarium narasumber an. F.W. sebesar Rp7.140.000;

6. Pengembalian Pembayaran Belanja Barang berupa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp260.000.

3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp344.307.437 dan Rp366.556.424. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang bukan pajak sebesar Rp344.307.437 terdiri atas:

1. Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp168.772.601;
2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultansi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
3. Kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada PT Wika Realty sebesar Rp30.113.250;
4. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provices Indonesia sebesar Rp41.678.902;
5. Kelebihan pembayaran Gaji Pokok untuk 2 orang pegawai a.n. M.N. sebesar Rp1.775.000 dan a.n. P.S.H. sebesar 5.958.900;
6. Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. M.I. sebesar Rp4.331.250;
7. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Jabatan a.n. C.B.T. sebesar Rp5.500.000;
8. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja a.n. W.S. sebesar Rp5.392.857.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp22.248.987 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019

366.556.424

Penambahan

		674.697.733
-	Mutasi tambah atas tagihan sewa ruangan gedung Kementerian BUMN oleh Teenant	609.227.258
-	Kelebihan pembayaran Gaji Pokok a.n. W.W. dan E.S.	14.246.100
-	Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural untuk 5 orang pejabat a.n. K.R.S. dkk.	15.370.000
-	Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk 5 orang pejabat a.n. K.R.S. dkk.	4.405.868
-	Kelebihan pembayaran Gaji Pokok a.n. I.W.	8.490.500
-	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja a.n. W.S.	5.392.857
-	Kelebihan Pembayaran Gaji a.n. M.N.	1.775.000
-	Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. M.I.	4.331.250
-	Pengembalian Tunjangan Jabatan a.n. C.B.T.	5.500.000
-	Pengembalian Gaji a.n. P.S.H.	5.958.900

Pengurangan

		696.946.720
-	Mutasi kurang atas pelunasan piutang sewa ruangan gedung Kementerian BUMN oleh Teenant	633.391.444
-	Pelunasan Kelebihan Pembayaran honorarium Staf Khusus untuk 5 orang a.n. P. N. dkk.	21.042.808
-	Pelunasan Kelebihan pembayaran Gaji Pokok a.n. W.W. dan E.S.	14.246.100

-	Pelunasan Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural untuk 5 orang pejabat a.n. K.R.S. dkk.	15.370.000	
-	Pelunasan Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk 5 orang pejabat a.n. K.R.S. dkk.	4.405.868	
-	Pelunasan Kelebihan pembayaran Gaji Pokok a.n. I.W.	8.490.500	
Jumlah Pengurangan			(22.248.987)
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020			(22.248.987)
Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020			344.307.437

Termasuk dalam nilai Piutang Bukan Pajak tersebut diatas adalah piutang atas tagihan sewa ruangan gedung Kementerian BUMN. Besaran sewa ruangan ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan. Dalam hal besaran sewa terjadi sebelum adanya penetapan dari Pengelola Barang, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian BUMN dapat menetapkan nilai besaran sewa berdasarkan hasil revidi dari aparat pengawas intern yaitu Inspektorat. Selanjutnya terhadap besaran sewa yang ditetapkan diatas melebihi dari nilai penetapan dari Pengelola Barang, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian besaran sewa apabila besaran sewa yang telah dibayarkan melebihi penetapan dari Pengelola Barang.

Per 31 Desember 2020, piutang sewa ruangan senilai Rp140.413.636. Dengan adanya addendum kontrak sewa ruangan yang mewajibkan tenant membayar denda atas keterlambatan pembayaran beban listrik dan air, maka piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang 31 Desember 2020			Total
		Ruangan	Listrik	Air	
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	0	1.065.325	0	1.065.325
	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	12.808.296	0	0	12.808.296
2	PT BRI (Persero), Tbk	0	4.187.605	0	4.187.605
3	PT Telekomunikasi Seluler	0	1.738.269	0	1.738.269
4	PT BNI (Persero), Tbk	25.178.420	9.719.913	75.929	34.974.262
5	PT XL Axiata	0	1.608.914	0	1.608.914
6	PT Danareksa	0	447.274	0	447.274
7	PT Pos Indonesia	1.699.920	782.729	0	2.482.649
8	PT Nitraya Bimasakti	0	1.971.817	417.161	2.388.978
9	PT BTN (ATM)	0	894.548	0	894.548
10	Koperasi Prabunara (48)	0	0	2.597.011	2.597.011
11	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	0	2.598.553	253.917	2.852.470
12	Koperasi Prabunara (48) Extnd.	100.727.000	0	0	100.727.000
	Jumlah	140.413.636	25.014.947	3.344.018	168.772.601

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp(41.709.952) dan Rp(108.215.814) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Terhadap debitur PT Bakrie Telecom yang digolongkan dalam kualitas piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%, Kementerian BUMN telah melakukan Penyerahan Pengurusan Piutang PT Bakrie Telecom kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan melalui Surat Pengguna Barang Nomor S-211 /KPB.MBU/10/2018 Tanggal 9 Oktober 2018. Berdasarkan Laporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan, Piutang PT Bakrie Telecom sebesar Rp427.670.500 telah dicicil dengan total pembayaran diterima sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp427.670.500 atau telah dinyatakan lunas.

Terhadap debitur PT Artefak Arkindo, telah disampaikan surat penagihan piutang yang kedua sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-38/S.MBU.C/09/2020 tanggal 25 September 2020 sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi diragukan.

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian BUMN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.500.000 dan Rp3.500.004. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi kedalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian lancar tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantinya sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.500 dan Rp17.500 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.000	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.175.459.227 dan Rp1.731.275.125. Nilai per tanggal 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	1.040.350.627	1.716.681.205
2	Bahan untuk Pemeliharaan	135.108.600	7.366.150
3	Bahan Baku	0	735.350
4	Persediaan Lainnya	0	6.492.420
Jumlah		1.175.459.227	1.731.275.125

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian BUMN seluruhnya seluas 17.776 M². Tanggal 11 Agustus 2015 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Nilai Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.468.058.953.000 dan Rp1.448.189.807.000. Kenaikan saldo tersebut disebabkan adanya Barang Rampasan Negara berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian BUMN berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp23.194.600.000 yang ditindaklanjuti dengan penetapan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, nilai Tanah atas Barang Rampasan Negara tersebut sebesar Rp19.869.146.000.

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp107.900.878.431 dan Rp125.125.261.746 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	17.840.098.171	24.153.623.017	(6.313.524.846)	(26,14)
2	Alat Angkutan	6.290.291.200	6.315.799.100	(25.507.900)	(0,40)
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.911.762.837	2.963.626.187	(51.863.350)	(1,75)
4	Alat Pengolahan	11.644.050	36.710.960	(25.066.910)	(68,28)
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.147.997.809	45.155.130.768	(14.007.132.959)	(31,02)
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.553.203.619	3.755.087.271	(201.883.652)	(5,38)
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	156.494.800	40.301.250	116.193.550	288,31
8	Alat Laboratorium	6.070.346.702	7.047.333.202	(976.986.500)	(13,86)
9	Alat Persenjataan	29.920.000	41.450.200	(11.530.200)	(27,82)
10	Komputer	39.612.120.940	35.514.047.941	4.098.072.999	11,54
11	Alat Keselamatan Kerja	199.796.453	99.132.000	100.664.453	101,55
12	Peralatan Proses/Produksi	2.159.850	3.019.850	(860.000)	(28,48)
13	Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat	75.042.000	0	75.042.000	0,00
Nilai Peralatan dan Mesin		107.900.878.431	125.125.261.746	(17.224.383.315)	(13,77)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(65.923.368.048)	(100.730.167.953)	34.806.799.905	(34,55)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		41.977.510.383	24.395.093.793	17.582.416.590	72,07

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN menerima Hibah Langsung berupa Lampu dan Ornamen Masjid 2020 dari Majelis Kerohanian Islam (MAKIS) Kementerian BUMN senilai Rp2.293.126.000 berdasarkan BAST-01/MAKIS/10/2020/BA-01/KPA.MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Hibah tersebut telah mendapatkan persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dari KPPN nomor 1023624019 tanggal 31 Desember 2020.

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2019		125.125.261.746
Mutasi Tambah		
- Belanja modal pengadaan Tahun Berjalan	19.117.058.495	
- Belanja Modal yang masih menjadi tunggakan berupa Pengadaan Furnitur	199.922.844	
- Belanja Modal yang masih menjadi tunggakan berupa Pengadaan Mesin Jilid	11.583.000	
- Hibah Peralatan dan Mesin sesuai BAST-01/MAKIS/10/2020/BA-Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Pengadaan Konsultan Perencana Lift	2.293.126.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	99.110.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	9.830.400.000	
- Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger Kementerian BUMN	99.946.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger	2.457.600.000	
Jumlah Mutasi Tambah		34.108.746.339
Mutasi Kurang		
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun belanja barang non operasional lainnya (521219)	1.636.250	
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111)	23.454.200	
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	9.735.000	
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	6.270.000	
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	434.095.048	
- Koreksi kesalahan pembebanan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) ke akun belanja barang non operasional lainnya (521219)	47.128.400	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Penghapusan Aset Tetap berdasarkan BA-01/PHS/2020	50.791.212.056	
- Aset Ekstrakomptabel	19.598.700	
Jumlah Mutasi Kurang		51.333.129.654
Jumlah Mutasi		(17.224.383.315)
Saldo Akhir 31/12/2020		107.900.878.431
Akumulasi Penyusutan		(65.923.368.048)
Nilai Buku per 31/12/2020		41.977.510.383

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp400.689.725.717 dan Rp396.488.627.387. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan di Kementerian BUMN sebagian besar diakibatkan oleh adanya penambahan yang berasal dari perolehan Barang Rampasan Negara.

Pada tahun 2020, terdapat Barang Rampasan Negara berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian BUMN berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp23.194.600.000 yang ditindaklanjuti dengan penetapan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, nilai Gedung dan Bangunan atas Barang Rampasan Negara tersebut sebesar Rp3.325.454.000.

Adapun Rincian kenaikan/ penurunan tersebut disajikan sebagai berikut:

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

Saldo Awal 31/12/2019		396.488.627.387
Mutasi Tambah		
- Belanja barang biaya Pengadaan Rumput Sintetis di Lantai 5, 6, dan 7 yang dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan	60.194.750	
- Belanja Modal Pengadaan Pekerjaan Partisi dan Pemasangan Wallpaper pada Lantai 6	30.857.750	
- Belanja Modal Konsultan Perencana Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	271.645.000	
- Belanja Modal Pengadaan Konsultan Perencana Lift	99.110.000	
- Belanja Modal Konsultan Perencana Penggantian Genset, Panel LVMDP, Dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	99.660.000	
- Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP	11.949.741.079	
- Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger	2.457.600.000	
- Pembayaran belanja modal pembuatan Logo melalui mekanisme TUP	191.400.000	
- Pembayaran belanja modal sekaligus (100%) biaya Pengadaan Pembuatan Ruang Loker dan Gudang Engineering Lantai 4	194.485.500	
- Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (20%) Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP	861.383.952	
- Pembayaran belanja modal biaya penggantian Lantai Lounge melalui mekanisme TUP	198.706.750	
- Pembayaran belanja modal biaya Manajemen Konstruksi Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	1.765.588.733	
- Pembayaran Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	9.830.400.000	
- Pembayaran belanja modal Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	53.773.742.534	
- Pembayaran belanja Modal biaya Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger Kementerian BUMN	99.946.000	
- Pembayaran belanja modal biaya Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP di Gedung Kementerian BUMN	3.445.535.808	
- Pembayaran belanja Modal honorarium Tim renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Kementerian BUMN Tahun 2020	130.500.000	
- Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Penggantian Genset, Panel LVMDP, Panel MDP di gedung Kementerian BUMN	98.752.500	
- Pembayaran Belanja Modal Pembangunan Klinik Kementerian BUMN	199.999.580	
- Hibah yang berasal dari Barang Rampasan Negara berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan KMK Nomor 142/KM.6/2020	3.325.454.000	
Jumlah Mutasi Tambah		89.084.703.936
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal Konsultan Perencana Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	271.645.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal Pengadaan Konsultan Perencana Lift	99.110.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal Konsultan Perencana Penggantian Genset, Panel LVMDP, Dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	99.660.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP	11.949.741.079	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger	2.457.600.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (20%) Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP	861.383.952	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja modal biaya Manajemen Konstruksi Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	1.765.588.733	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	9.830.400.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja modal Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	53.096.790.550	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal biaya Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger Kementerian BUMN	99.946.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja modal biaya Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP di Gedung Kementerian BUMN	3.445.535.808	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Belanja Modal honorarium Tim renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Kementerian BUMN Tahun 2020	130.500.000	
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Belanja Modal Konsultan Pengawas Penggantian Genset, Panel LVMDP, Panel MDP di gedung Kementerian BUMN	98.752.500	
- Reklasifikasi ke Piutang Bukan Pajak atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Kementerian BUMN yang tidak selesai 100%	676.951.984	
Jumlah Mutasi Kurang		84.883.605.606
Jumlah Mutasi		4.201.098.330
Saldo Akhir		400.689.725.717
Akumulasi Penyusutan		(26.529.064.349)
Nilai Buku Per 31/12/2020		374.160.661.368

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 disajikan di Lampiran Laporan Keuangan ini.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp7.706.388.680 dan Rp3.201.056.420. Rincian mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2019		3.201.056.420
Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Berupa Konsultan Perencana Penggantian Genset, Panel LVMDP, dan Panel MDP di Gedung	99.660.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Berupa Pengadaan Penggantian Genset, Panel LVMDP, dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	4.306.919.760	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Berupa Konsultan Pengawas Penggantian Genset, Panel LVMDP, dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	98.752.500	
Jumlah Mutasi Tambah		<u>4.505.332.260</u>
Mutasi Kurang		
-		<u>-</u>
Jumlah Mutasi Kurang		<u>-</u>
Jumlah Mutasi		4.505.332.260
Saldo Akhir 31/12/2020		<u>7.706.388.680</u>
Akumulasi Penyusutan		<u>(1.247.785.196)</u>
Nilai Buku Per 31/12/2020		<u>6.458.603.484</u>

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.066.410.162 dan Rp1.066.410.162. Tidak terdapat penambahan pada pos Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp576.910.162, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp489.500.000.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp68.862.035.362 dan Rp1.647.770.000. Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp68.862.035.362 merupakan:

1. Pengadaan Manajemen Konstruksi Renovasi Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola Tahun 2019 senilai Rp282.480.000;
2. Pengadaan Jasa Konsultansi, konsultan perencana renovasi ruang kerja, perbaikan mep dan pengadaan gondola Tahun 2019 senilai Rp1.275.340.000;
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Arsip Tahun 2019 senilai Rp89.950.000. Saat ini, sedang diajukan permohonan penghapusan BMN sesuai S-209/KPB.MBU/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.

4. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020 senilai Rp271.645.000;
5. Uang Muka Kerja (20%) pekerjaan konstruksi renovasi ruang kerja dan perbaikan MEP senilai Rp11.949.741.079;
6. Pengadaan Manajemen Konstruksi Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN senilai Rp1.765.588.733;
7. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN senilai Rp53.096.790.550;
8. Honorarium Tim Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Kementerian BUMN Tahun 2020 senilai Rp130.500.000.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2019		1.647.770.000
Mutasi Tambah		84.206.653.622
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Konsultan Perencana Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	271.645.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Pengadaan Konsultan Perencana Lift	99.110.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Konsultan Perencana Penggantian Genset, Panel LVMDP, Dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	99.660.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP	11.949.741.079	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger	2.457.600.000	
- Reklasifikasi dari Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (20%) Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP	861.383.952	
- Reklasifikasi dari Belanja modal biaya Manajemen Konstruksi Tahap Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	1.765.588.733	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	9.830.400.000	
- Reklasifikasi dari Belanja modal Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN	53.096.790.550	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal biaya Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger Kementerian BUMN	99.946.000	
- Reklasifikasi dari Belanja modal biaya Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP di Gedung Kementerian BUMN	3.445.535.808	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal honorarium Tim renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Kementerian BUMN Tahun 2020	130.500.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Konsultan Pengawas Penggantian Genset, Panel LVMDP, Panel MDP di gedung Kementerian BUMN	98.752.500	
Mutasi Kurang		16.992.388.260
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Belanja Modal Pengadaan Konsultan Perencana Lift	99.110.000	
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja modal Konsultan Perencana Penggantian Genset, Panel LVMDP, Dan Panel MDP di Gedung Kementerian BUMN	99.660.000	
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (20%) Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP	861.383.952	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Belanja Modal biaya Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger di Gedung Kementerian BUMN	9.830.400.000	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Belanja Modal biaya Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger Kementerian BUMN	99.946.000	
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja modal biaya Pengadaan Penggantian Panel LVMDP dan MDP di Gedung Kementerian BUMN	3.445.535.808	
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Belanja Modal Konsultan Pengawas Penggantian Genset, Panel LVMDP, Panel MDP di gedung Kementerian BUMN	98.752.500	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Belanja Modal Uang Muka Kerja (20%) Penggantian 6 (Enam) Unit Lift Passenger	2.457.600.000	
Jumlah Mutasi		67.214.265.362
Saldo Akhir 31/12/2020		68.862.035.362

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(93.700.217.593) dan Rp(120.240.627.104). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	107.900.878.431	65.923.368.048	41.977.510.383
2	Gedung dan Bangunan	400.689.725.717	26.529.064.349	374.160.661.368
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	1.247.785.196	6.458.603.484
4	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	0	1.066.410.162
	Jumlah	517.363.402.990	93.700.217.593	423.663.185.397

15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667, per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut diatas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp28.240.748 dan Rp28.964.410. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/ Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar, sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
5‰ x 28.240.748	(141.204)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	28.099.544

16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp141.204 dan Rp144.822 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	28.240.748	0,50%	141.204

17. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp23.281.538.648 dan Rp23.246.192.650.

Aset Tak Berwujud pada Kementerian BUMN berupa Aplikasi (*software*) dan Lisensi. Penjelasan atas Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Portal Publik (www.bumn.go.id) senilai Rp480.892.500 adalah portal yang menyediakan informasi secara umum tentang BUMN dan Kementerian BUMN yang dikelola secara kolektif oleh masing-masing BUMN bersama-sama Kementerian BUMN sebagai komponen pendukung untuk transparansi kepada publik, yang menjadi sarana bagi publik untuk berinteraksi dengan BUMN dan Kementerian BUMN. Dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari stakeholder, maka sistem tersebut diredesain pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan perubahan yang semula Zend Framework menjadi open source Wordpress Framework dengan menggunakan aplikasi CMS dari Wordpress yang telah disesuaikan dengan user requirement pengguna BUMN dan Kementerian BUMN dengan PHP Programming Language dan MySQL database dengan menghilangkan AJAX yang bertujuan portal dapat diakses dengan universalweb browser dan mobile content-friendly. Pada tahun 2016 dilakukan pengembangan secara mandiri dengan menggunakan Framework Zend Framework & database PostgreSQL dan digunakan sampai sekarang.
2. Sistem Informasi Manajemen ASN (simanis) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama office automation (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian BUMN seperti modul Pengelolaan Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, Monitoring Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.
3. Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <http://pkbl.bumn.go.id> senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan saat ini telah digunakan oleh Kementerian BUMN untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI dengan menyesuaikan data dan peraturan yang berlaku saat ini.
4. Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp1.427.335.424, dan telah digunakan oleh Kementerian BUMN sebagai informasi masa jabatan Direksi dan Komisaris serta

talent pool kandidat Direksi dan Komisaris BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif.

5. Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama Executive Information System (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal Financial Information System (FIS) pada tahun 2011 dan terakhir diubah menjadi SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) pada tahun 2018. Portal tersebut digunakan oleh BUMN melaporkan laporan Keuangan/manajemen secara berkala kepada Kementerian BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. SiLABA berdasarkan fungsinya sebagai media pelaporan keuangan seluruh BUMN terdiri dari Laporan Audited, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
6. Portal Aset (<http://aset.bumn.go.id>) senilai Rp2.237.746.984 mulai dibangun pada tahun 2008 dan telah diimplementasikan pada tahun 2009. Portal Aset adalah sistem informasi yang menginventarisasi data aset yang dimiliki BUMN, meliputi data fisik aset, data administrasi, data kepemilikan beserta dokumen terkait. Pada Tahun 2010 dilakukan perbaikan untuk beberapa menu untuk ringkasan eksekutif dan pemasukan data. Pada tahun 2015 dilakukan Redesain Portal Aset untuk menyempurnakan proses pengadministrasian dan pendayagunaan aset BUMN melalui Portal Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN serta penghapusbukuan Aset BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010. Selain itu, dilakukan pula penghapusan fungsi rencana dan realisasi investasi pada Portal Aset untuk menghindari double inputting CAPEX/belanja modal yang telah diakomodir dalam Portal FIS.
7. Lisensi Aplikasi Penunjang Pilot Sistem BI senilai Rp276.092.300 adalah aplikasi penunjang Business Intelligence (BI) untuk memberikan manfaat kepada pimpinan Kementerian BUMN untuk membantu pekerjaannya. Lisensi Aplikasi ini saat ini masih digunakan untuk system virtualisasi HyperV.
8. Lisensi Windows Server 2012 R2 Data Center Edition senilai Rp367.591.912 Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
9. Lisensi Windows Server 2012 User Cal senilai Rp150.518.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
10. Lisensi Exchange Server 2013 Standard senilai Rp21.125.952 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
11. Lisensi Exchange Server 2013 Enterprise senilai Rp120.921.608 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
12. Lisensi Exchange Standart CAL 2013 OLP NL USERCAL senilai Rp140.864.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.

13. Lisensi Exchange Standart CAL 2013 OLP woSrvcs senilai Rp88.252.500 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
14. Lisensi WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UserCAL senilai Rp124.995.000 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
15. Dashboard BUMN senilai Rp2.251.541.016 yang dibangun tahun 2015 merupakan aplikasi untuk menampilkan dashboard monitoring atas informasi strategis BUMN, berupa kantor pusat dan anak perusahaan BUMN, Direksi & Komisaris BUMN, proyek strategis BUMN, serta data finansial BUMN.
16. Aplikasi Private Cloud senilai Rp800.000.000 yang dibangun pada tahun 2015 merupakan aplikasi untuk optimalisasi sistem file sharing di Kementerian BUMN yang terletak pada cloud internal Kementerian BUMN yaitu di Datacenter Kementerian BUMN. Aplikasi Private Cloud mendukung Pegawai Kementerian BUMN dapat mengakses file sharing pada saat berada diluar gedung Kementerian BUMN, dan juga menyediakan layanan personal cloud untuk para Pegawai Kementerian BUMN menyimpan data pribadi bersifat kedinasan dan non kedinasan yang memungkinkan data diakses secara online ataupun offline melalui PC, Laptop, Tablet, Mobile berbasis IOS, Android, Windows Phone dan Blackberry dengan menggunakan koneksi internet tanpa mengindahkan aspek keamanan dan fungsi kontrol IT dalam penggunaannya.
17. Lisensi Anti Spam senilai Rp70.180.000 merupakan perangkat Email Security Gateway sebagai sarana infrastruktur di Kementerian BUMN, sebagai proteksi fasilitas email Kementerian BUMN dari permasalahan spam.
18. Lisensi Sistem Backup senilai Rp152.848.707 untuk sistem backup penyimpanan data server dari clustering server ke tape drive.
19. Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak virtual machine untuk menciptakan dan mensimulasikan server secara virtual. VMware berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.
20. Lisensi Cisco 5508 Series senilai Rp320.386.220 merupakan perangkat WLAN Controller yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan sinyal wifi dan mengatur access point sesuai coverage areanya.
21. Antivirus Endpoint Protection senilai Rp26.048.611 adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan pada server dari serangan dan permasalahan virus.
22. Lisensi Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah upgrade sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian BUMN.
23. Datacom Call Partner senilai Rp28.094.000 merupakan sistem billing yang terpasang pada server untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dari penggunaan IP Phone di Kementerian BUMN.
24. *Assesment* Jaringan dan *Data Center* senilai Rp140.283.000 berfungsi menyediakan hasil *assessment*, rekomendasi serta aplikasi monitoring jaringan, server dan storage serta kondisi data center

Kementerian BUMN. Adapun aspek jaringan yang diuji adalah infrastruktur, performance, dan keamanan jaringan. Sedangkan untuk aspek data center yang diuji adalah keamanan, kelistrikan, pendinginan ruangan dan sistem pengkabelan data.

25. Microsoft Sharepoint senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform* Sharepoint yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari Microsoft Sharepoint Server dan CAL yang merupakan Software untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
26. Lisensi SSL Digicert senilai Rp268.435.998 merupakan lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di website melalui internet dengan teknologi enkripsi data yang canggih. SSL yang digunakan di Kementerian BUMN adalah SSL Digicert yang telah digunakan sejak tahun 2014 dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan 2017. Pembelian SSL Digicert sifatnya pembaruan dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2020, terdapat perpanjangan selama 3 tahun Subscription Lisensi SSL Digicert senilai Rp35.345.998 yang menambah nilai aset tersebut.
27. Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
28. Penambahan Agent for VMware and HyperV pada Aplikasi Sistem *backup* senilai Rp100.386.000 merupakan aplikasi untuk penambahan agen VMware dan Hyper-V pada aplikasi sistem *backup*.
29. Software Office senilai Rp744.150.000 merupakan software untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian BUMN dalam menyelesaikan tugas.
30. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
31. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
32. Navicat PostgreSQL, Nitro PDF 12, Sectigo SSL DV Certificate, Sketch, UI8 Design Resources, Easus Data Recovery, Adobe CC All Aps, JetBrains PhpStorm senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian BUMN yang diadakan pada tahun 2019.
33. Software Office 2019 senilai Rp114.360.000, merupakan software untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian BUMN.

18. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp50.942.645.557 dan Rp151.433.500. Saldo pos Aset Lain-lain mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset	Dasar	Nilai	Diusulkan Penghapusan	Nilai 2020
1	Aset Tetap	Berita Acara No BA-02/PHS/2017 tanggal 20 September 2017	359.288.314	359.288.314	0
2	Aset Tetap	Berita Acara No BA-01/PHS/2018 tanggal 16 Maret 2018	9.273.000	9.273.000	0
4	Aset Tetap	Berita Acara No BA-01/PHS/2019 tanggal 27 Maret 2019	515.269.810	515.269.810	0
5	Aset Tetap	Berita Acara No BA-03/PHS/2019 tanggal 15 April 2019	3.438.228.156	3.438.228.156	0
6	Aset Tetap	Berita Acara No BA-05/PHS/2019 tanggal 17 Juni 2019	77.065.310	77.065.310	0
7	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-07/PHS/2019 tanggal 11 November 2019	128.326.000	0	128.326.000
8	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-02/PHS/2019 tanggal 27 Maret 2019	23.107.500	0	23.107.500
9	Aset Tetap	Berita Acara No. BA-01/PHS/2020 tanggal 23 Desember 2020	50.791.212.057	0	50.791.212.057
Total			4.550.558.090	4.399.124.590	50.942.645.557

Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.791.212.057 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Aset	Kuantitas	Jumlah
1	Alat Bantu	6	18.800.580.846
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	25.507.900
3	Alat Bengkel Bermesin	8	26.543.000
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	19	24.745.050
5	Alat Ukur	1	575.300
6	Alat Pengolahan	13	25.066.910
7	Alat Kantor	971	7.859.710.493
8	Alat Rumah Tangga	4.004	10.611.187.788
9	Alat Studio	19	783.423.700
10	Alat Komunikasi	132	192.383.520
11	Alat Kedokteran	38	38.321.250
12	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	50	303.863.450
13	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2	48.400.000
14	Peralatan laboratorium Hydrodinamica	19	704.992.800
15	Persenjataan Non Senjata Api	2	11.530.200
16	Komputer Unit	294	7.435.504.125
17	Peralatan Komputer	142	3.798.883.725
18	Alat Kerja Penerbangan	10	99.132.000
19	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	860.000
Jumlah			50.791.212.057

Aset Tak Berwujud yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp151.433.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset	Kelompok	Kuantitas	NUP Awal	NUP Akhir	Jumlah
1	Microsoft Project	Lisensi	3	1	3	17.257.500
2	Microsoft Visio	Lisensi	2	4	5	5.850.000

3	Sophos Endpoint Protection	Lisensi	380	1529	1908	128.326.000
Jumlah						151.433.500

19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(67.646.810.616) dan Rp(18.268.348.059). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2020	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2019	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
A	Aset Tak Berwujud				
1	Software	15.962.893.725	15.445.913.455	15.491.280.760	516.980.270
2	Lisensi	7.318.644.923	3.323.443.308	2.709.045.699	3.995.201.615
Jumlah		23.281.538.648	18.769.356.763	18.200.326.459	4.512.181.885
B	Aset Lain-lain				
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	50.791.212.057	48.796.599.653	0	1.994.612.404
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	151.433.500	80.854.200	68.021.600	70.579.300
Jumlah		50.942.645.557	48.877.453.853	68.021.600	2.065.191.704
Total		74.224.184.205	67.646.810.616	18.268.348.059	6.577.373.589

20. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.468.333.417 dan Rp102.881.340. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.365.452.077 dibandingkan Per 31 Desember 2019 karena terdapat mutasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Nilai Utang Per 31 Desember 2019	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Desember 2020	Keterangan
				Tambah	Kurang		
1	Kekurangan pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2019	Rapel Gaji	15.862.480	0	15.862.480	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut - 200191304015089; - 200191304015081; 200191304014949 - 200191304015082
		Gaji Susulan	7.075.673	0	7.075.673	0	
2	Pengadaan jasa service maintenance mesin chiller	Belanja Barang	32.560.000	0	32.560.000	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut - 200191303015599 - 200191304016763
3	Pengadaan tagihan air minum dalam kemasan	Belanja Barang	4.440.000	0	4.440.000	0	
4	Kekurangan pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2019	Belanja Pegawai	42.943.187	0	42.943.187	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut - 200191302003986 - 200191302003985
5	Kekurangan pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	12.252.872	12.252.872	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 200191304038202
6	Kekurangan pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	2.272.127	2.272.127	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 200191304038203
7	Kekurangan pembayaran tunjangan struktural Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	4.169.060	4.169.060	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 200191304038201
8	Kekurangan pembayaran THR Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	182.299	182.299	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 200191304038204
9	Kekurangan pembayaran gaji ke 13 Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	12.298.314	0	12.298.314	Kekurangan pembayaran Gaji ke 13 tahun 2020 untuk 14 pegawai
10	Kekurangan pembayaran gaji pegawai tahun 2020	Belanja Pegawai	0	6.619.126	6.619.126	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 200191304038195
11	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2020*	Belanja Barang	0	2.150.094.226	0	2.150.094.226	Tunggakan Belanja Barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020
12	Tunggakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020*	Belanja Modal	0	211.505.844	0	211.505.844	Tunggakan Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020
13	Kekurangan pembayaran tunjangan jabatan Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	67.028.778	0	67.028.778	Kekurangan pembayaran tunjangan jabatan Tahun 2020 untuk 1 pegawai
14	Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2020	Belanja Pegawai		1.145.801	0	1.145.801	Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2020 untuk 1 pegawai
15	Kekurangan pembayaran gaji ke 13 Tahun 2020	Belanja Pegawai		13.027.814	0	13.027.814	Kekurangan pembayaran gaji ke 13 Tahun 2020 untuk 15 pegawai
16	Kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan pangkat Tahun 2020	Belanja Pegawai		4.425.340	0	4.425.340	Kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan pangkat Tahun 2020 untuk 7 pegawai
17	Kekurangan pembayaran gaji pegawai tahun 2020	Belanja Pegawai		8.807.300	0	8.807.300	Kekurangan pembayaran gaji Tahun 2020 untuk 1 pegawai
Total			102.881.340	2.493.828.901	128.376.824	2.468.333.417	

21. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian BUMN yang telah dibayarkan oleh *tenant* untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing

sebesar Rp7.147.613.212 dan Rp3.278.144.675. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.147.613.212 terdiri atas:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Pembayaran Yang Telah Dilakukan Tenant	Pendapatan Sewa Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	140.846.000	35.211.500	105.634.500
2	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	244.886.704	13.604.817	231.281.887
3	PT BRI (Persero), Tbk	5.653.110.000	1.413.277.500	4.239.832.500
4	PT BRI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	53.222.400	13.305.600
5	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	66.525.000	199.575.000
6	PT BNI (Persero), Tbk	1.258.921.000	1.048.481.667	210.439.333
7	PT BNI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	48.787.200	17.740.800
8	PT XL Axiata	268.045.000	53.609.000	214.436.000
9	PT Danareksa	156.855.000	36.599.500	120.255.500
10	Koperasi Prabunara (Basement)	175.108.000	172.189.533	2.918.467
11	Koperasi Prabunara (48)	2.291.824.500	954.926.875	1.336.897.625
12	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	411.430.500	150.857.850	260.572.650
13	Koperasi Prabunara (Sport Center)	196.125.000	35.956.250	160.168.750
14	PT Pos Indonesia	42.498.000	21.249.000	21.249.000
15	PT BTN (ATM)	66.528.000	53.222.400	13.305.600
	Jumlah	11.305.333.704	4.157.720.492	7.147.613.212

22. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.869.742.868 dan Rp1.860.229.141.715. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.095.990.478 dan Rp4.607.618.739. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian BUMN oleh para *tenant*, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Anggaran Lain-lain, serta Pendapatan Sitaan/Rampasan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.954.957.662	4.557.123.828	(602.166.166)	(15,23)
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	140.461.577	50.494.911	89.966.666	64,05
3	Pendapatan Anggaran Lain-lain	571.239	0	571.239	100,00
	Total	4.095.990.478	4.607.618.739	(511.628.261)	(12,49)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.954.957.662 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh <i>Tenant</i>	8.158.124.225
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	3.278.144.675
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(7.147.613.212)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	(63.632.464)
- Jurnal balik atas Penyesuaian Pendapatan Tenant	(282.655.500)
- Jurnal Koreksi Audited BPK	12.589.939
	<u>3.954.957.662</u>

2. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp140.461.577 terdiri atas:

- Denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruangan a.n. PT BRI (Persero) sebesar Rp113.062.200;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangan lampu rotator pada kendaraan pengawal Menteri BUMN sebesar Rp75.042;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konsultan perencana lift termin kedua sebesar Rp445.995;
- Denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruangan a.n. PT BNI (Persero) sebesar Rp25.178.420;

- e. Denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruangan a.n. PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.699.920.
3. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp571.239 merupakan potongan pembulatan SPM pada tahun anggaran 2020.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp57.684.364.855 dan Rp57.720.486.671. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.436.296.746	22.593.390.639	1.842.906.107	8,16
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.399.266.506	575.102.255	824.164.251	143,31
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	31.915.123.158	34.587.787.348	(2.672.664.190)	(7,73)
	Jumlah Belanja Kotor	57.750.686.410	57.756.280.242	(5.593.832)	(0,01)
	Pengembalian Belanja Pegawai	(110.467.705)	(18.048.018)	(92.419.687)	512,08
	Jumlah	57.640.218.705	57.738.232.224	(98.013.519)	(0,17)
1	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai 2018	0	(38.341.199)	38.341.199	100,00
2	Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok Pegawai 2019	0	(26.100.900)	26.100.900	100,00
3	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 2019	0	(19.184.794)	19.184.794	100,00
4	Utang Kekurangan Pembayaran Gaji & Tunjangan Struktural Pegawai 2019	0	65.881.340	(65.881.340)	100,00
5	Pembayaran Kekurangan Beban Pegawai Tahun 2019	(65.881.340)	0	(65.881.340)	(100,00)
6	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	132.228.831	0	132.228.831	100,00
7	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	(25.495.484)	0	(25.495.484)	(100,00)
8	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	(61.139.225)	0	(61.139.225)	(100,00)
9	Pelunasan Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	42.512.468	0	42.512.468	100,00
10	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020	21.920.900	0	21.920.900	(100,00)
	Total	57.684.364.855	57.720.486.671	(36.121.816)	(0,06)

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.302.075.427 dan Rp3.004.863.573. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Beban Barang Konsumsi	2.294.847.657	2.998.520.287	(703.672.630)	(23,47)
4	Beban Bahan Baku	735.350	600.600	134.750	22,44
5	Beban Persediaan Lainnya	6.492.420	5.742.686	749.734	13,06
	Jumlah	2.302.075.427	3.004.863.573	(702.788.146)	(23,39)

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp70.751.947.107 dan Rp76.714.908.814. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Beban Barang Operasional	10.754.360.002	10.007.322.059	747.037.943	7,46
2	Beban Barang Non Operasional	13.549.689.962	22.103.554.988	(8.553.865.026)	(38,70)
3	Beban Jasa	46.428.298.443	44.604.031.767	1.824.266.676	4,09
4	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	19.598.700	0	19.598.700	100,00
	Beban Barang dan Jasa Kotor	70.751.947.107	76.714.908.814	(5.961.846.858)	(7,77)

1) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.754.360.002 dan Rp10.007.322.059. Rincian Beban Barang Operasional pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Barang Operasional	10.991.610.687	11.283.838.062	(292.227.375)	(2,59)
	Jumlah	10.991.610.687	11.283.838.062	(292.227.375)	(2,59)
1	Pelunasan atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	0	(725.394.120)	725.394.120	100,00
2	Pelunasan pembayaran honor staf khusus menteri bulan Desember 2018 an Wianda Puspongoro	0	(4.375.000)	4.375.000	100,00
3	Penyesuaian atas Pengadaan Persediaan yang menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Barang Pecah Belah dan Kardus Arsip	0	(153.418.330)	153.418.330	100,00
4	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	0	(373.219.761)	373.219.761	100,00
5	Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. PN Tahun 2019	0	(416.667)	416.667	100,00
6	Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. AS dan AA Tahun 2019	0	(8.662.500)	8.662.500	100,00
7	Kelebihan pembayaran Honor PPNPN Tahun 2019	0	(11.029.625)	11.029.625	100,00
8	Pengembalian Beban Jasa Operasional	(30.642.336)	0	(30.642.336)	(100,00)
9	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	(966.678.264)	0	(966.678.264)	(100,00)

10	Tunggakan Belanja Barang Operasional Tahun 2020	239.804.300	0	239.804.300	100,00
11	Tunggakan Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	75.611.666	0	75.611.666	100,00
12	Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. MI	(4.331.250)	0	(4.331.250)	(100,00)
13	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa yang menggunakan akun Peralatan dan Mesin	450.100.048	0	450.100.048	100,00
14	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (521111)	260.750	0	260.750	100,00
15	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (521115)	30.381.586	0	30.381.586	100,00
16	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (521111)	(96.075)	0	(96.075)	100,00
17	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (521211)	(8.201.110)	0	(8.201.110)	100,00
18	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (522151)	(23.460.000)	0	(23.460.000)	100,00
Total		10.754.360.002	10.007.322.059	747.037.943	7,46

2) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.549.689.962 dan Rp22.103.554.988. Rincian Beban Barang Non Operasional pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Barang Non Operasional	13.071.104.835	22.178.987.383	(9.107.882.548)	(41,07)
	Pengembalian Beban Barang Non Operasional tahun 2019	0	(10.775.000)	10.775.000	100,00
	Pembayaran Tunggakan Biaya pengadaan natura rapat koordinasi Biro Umum dan Humas Tahun 2018	0	(65.802.000)	65.802.000	100,00
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa yang menggunakan akun Persediaan	0	1.144.605	(1.144.605)	(100,00)
	Pengembalian Beban Barang Non Operasional tahun 2020	(8.699.626)	0	(8.699.626)	(100,00)
	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.764.650	0	48.764.650	100,00
	Tunggakan Belanja Bahan Tahun 2020	258.395.103	0	258.395.103	100,00
	Tunggakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2020	180.125.000	0	180.125.000	100,00
	Jumlah	13.549.689.962	22.103.554.988	(8.553.865.026)	(38,70)

3) Beban Jasa

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.428.298.443 dan Rp44.604.031.767. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Jasa	45.225.053.152	45.931.174.418	(706.121.266)	(1,54)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Pelunasan atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	0	(1.285.948.943)	1.285.948.943	100,00
2	Penyesuaian atas Pengadaan Persediaan yang menggunakan akun Belanja Jasa berupa Pengadaan Kardus Arsip	0	(9.982.500)	9.982.500	100,00
3	Penyesuaian atas Pengadaan Aset Tak Berwujud yang menggunakan akun Belanja Jasa berupa Aplikasi Simawas dan Aplikasi Simaris	0	(198.000.000)	198.000.000	100,00
4	Pelunasan atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Housekeeping, Pengamanan dan Pengemudi Tahun 2018	0	65.808.792	(65.808.792)	(100,00)
5	Penyesuaian atas Pengadaan Jasa Audit Lift Gedung Kementerian BUMN yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	94.930.000	(94.930.000)	(100,00)
6	Penyesuaian atas Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	6.050.000	(6.050.000)	(100,00)
7	Pengembalian Beban Jasa	(7.975.000)	0	(7.975.000)	(100,00)
8	Tunggakan Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	798.862.000	0	798.862.000	100,00
9	Tunggakan Beban Langganan Listrik	27.936.414	0	27.936.414	100,00
10	Tunggakan Beban Langganan Air	9.288.920	0	9.288.920	100,00
11	Tunggakan Beban Jasa Konsultan	100.025.000	0	100.025.000	100,00
12	Tunggakan Beban Sewa	226.764.957	0	226.764.957	100,00
13	Tunggakan Beban Jasa Lainnya	48.343.000	0	48.343.000	100,00
	Jumlah	46.428.298.443	44.604.031.767	1.824.266.676	4,09

4) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.598.700 dan Rp0. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Penyesuaian Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	19.598.700	0	19.598.700	100,00
	Jumlah	19.598.700	0	19.598.700	100,00

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.438.185.133 dan Rp4.950.367.928. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Pemeliharaan	8.907.986.642	4.547.511.917	4.360.474.725	95,89
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	142.703.770	(142.703.770)	(100,00)
2	Beban Persediaan Bahan untuk Suku Cadang	0	3.206.500	(3.206.500)	(100,00)
3	Koreksi biaya license	0	466.833.001	(466.833.001)	(100,00)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
4	Koreksi pencatatan voucher BBM	0	7.725.000	(7.725.000)	(100,00)
5	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 yang belum dibayar berupa Jasa Service Maintenance Chiller	0	32.560.000	(32.560.000)	(100,00)
6	Penyesuaian Belanja Pemeliharaan yang diklasifikasikan sebagai Software berupa Langganan Aplikasi Pendukung Pengembangan TI 2019	0	(28.711.060)	28.711.060	100,00
7	Penyesuaian Belanja Pemeliharaan yang diklasifikasikan sebagai Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) berupa Lisensi Anti Virus yang tidak memenuhi klasifikasi Aset Tak Berwujud	0	(221.461.200)	221.461.200	100,00
8	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Tahun 2020	49.824.922	0	49.824.922	100,00
9	Koreksi pencatatan voucher BBM	(7.350.000)	0	(7.350.000)	(100,00)
10	Penyesuaian atas Belanja Pemeliharaan berupa Pelunasan Jasa Service dan Maintenance Mesin Tahun 2019	(32.560.000)	0	(32.560.000)	(100,00)
11	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.454.200	0	23.454.200	100,00
12	Tunggakan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020	5.478.000	0	5.478.000	100,00
13	Tunggakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020	51.205.000	0	51.205.000	100,00
14	Tunggakan Beban Pemeliharaan Lainnya	49.331.195	0	49.331.195	100,00
15	Penyesuaian atas Biaya Warranty	(91.499.999)	0	(91.499.999)	(100,00)
16	Penyesuaian atas pembebanan Belanja pengadaan air minum yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(2.604.500)	0	(2.604.500)	(100,00)
17	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Modal Aset Tak Berwujud yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(35.345.998)	0	(35.345.998)	(100,00)
18	Koreksi Audited BPK Kesalahan Pencatatan Lisensi	(479.734.329)	0	(479.734.329)	(100,00)
Jumlah		8.438.185.133	4.950.367.928	3.487.817.205	70,46

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.402.379.216 dan Rp41.313.124.922. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2020	31 Desember 2019		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.773.325.756	41.419.049.462	(24.645.723.706)	(59,50)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	591.240.263	300.841.000	290.399.263	100,00
		17.364.566.019	41.719.890.462	(24.355.324.443)	(58,38)
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(87.356.803)	(52.105.540)	(35.251.263)	(67,65)
2	Pelunasan atas Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 yang belum dibayar	0	(354.660.000)	354.660.000	100,00
3	Penyesuaian atas pembebanan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang menggunakan akun Beban Persediaan	17.850.000	0	17.850.000	100,00
4	Tunggakan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2020	107.580.000	0	107.580.000	100,00
5	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (524119)	(260.000)	0	(260.000)	100,00
Jumlah		17.402.379.216	41.313.124.922	(23.910.745.706)	(57,88)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.359.614.648 dan Rp20.526.180.692. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.480.082.480	11.565.089.483	914.992.997	7,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.094.741.689	7.409.582.402	685.159.287	9,25
Beban Penyusutan Jaringan	171.648.705	88.216.628	83.432.077	94,58
Jumlah	20.746.472.874	19.062.888.513	1.683.584.361	8,83
Beban Amortisasi Software	341.861.680	701.717.550	(359.855.870)	(51,28)
Beban Amortisasi Lisensi	732.607.054	737.256.054	(4.649.000)	(0,63)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	12.832.600	7.571.675	5.260.925	69,48
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	1.525.840.440	16.746.900	1.509.093.540	9011,18
Jumlah	2.613.141.774	1.463.292.179	1.149.849.595	78,58
Total	23.359.614.648	20.526.180.692	2.833.433.956	13,80

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(66.509.480) dan Rp(336.736.601). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(66.509.480) merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Piutang Macet dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	(10.462.600)	10.462.600	100,00
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	(10.462.600)	10.462.600	100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.265.240	68	17.265.172	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	44.654.182	174.264.137	(129.609.955)	(74,38)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019		
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	3.676.000	1.624.567.440	(1.620.891.440)	(99,77)
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Perjadin, Belanja Jasa, dan Honor Tahun 2018	0	(77.288.800)	77.288.800	100,00
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tahun 2018	0	(7.600.000)	7.600.000	100,00
Pencairan Bank Garansi (3,453%) Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama KBUMN	0	(1.624.567.440)	1.624.567.440	100,00
Pembayaran Kelebihan pembayaran honor Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah BUMN 2018	0	(7.650.000)	7.650.000	100,00
Pembayaran Kelebihan Tunjangan JFA dan Tukin a.n. ABB	0	(6.787.260)	6.787.260	100,00
Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. HRH	0	21.042.808	(21.042.808)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	36.566.858	127.087.102	(90.520.244)	(71,23)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(50.482.233)	(57.542.222)	7.059.989	12,27
Beban Persediaan Rusak/Usang	(346.947.200)	(116.173.552)	(230.773.648)	(198,65)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Gaji pegawai an. RNZ dkk	(28.020.454)	0	(28.020.454)	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja an. MW dkk	(17.265.240)	0	(17.265.240)	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. HRH dan Asy	(21.042.808)	0	(21.042.808)	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus an. AS dkk	(8.662.500)	0	(8.662.500)	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium PPNN tahun 2019	(11.029.625)	0	(11.029.625)	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus an. PN	(416.667)	0	(416.667)	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengakuan Beban Kerugian atas Persediaan Usang	(24.189.760)	0	(24.189.760)	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (425911)	21.920.900	0	21.920.900	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (425912)	30.642.336	0	30.642.336	(100,00)
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(357.006.971)	49.352.281	(406.359.252)	(823,38)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(357.006.971)	38.889.681	(395.896.652)	(1018,00)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.860.229.141.715 dan Rp560.895.704.225.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(176.133.073.399) dan Rp(199.246.687.579). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp493.278.682 dan Rp1.305.579.958.345. Koreksi yang terjadi selama tahun 2020 yaitu Koreksi Lain-Lain sebesar Rp(28.282.920) yang merupakan Koreksi Pengakuan Piutang yang belum dicatat atas Kelebihan Pembayaran honorarium dan tunjangan kinerja atas belanja TA 2018 a.n. JJD (periode Februari dan Oktober 2018) sesuai dengan jurnal koreksi atas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2019 serta Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang TP/TGR sesuai dengan jurnal koreksi atas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2020. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp521.561.602.

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp277.280.395.870 dan Rp193.000.166.724. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	260.130.543.993
Diterima dari Entitas Lain	(8.337.874.123)
Transfer Masuk	23.194.600.000
Pengesahan Hibah Langsung	2.293.126.000
Jumlah	277.280.395.870

Nilai Transfer Masuk sebesar Rp23.194.600.000 merupakan Barang Rampasan Negara yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp2.293.126.000 merupakan Hibah Barang berupa Lampu dan Ornamen pada Masjid Ar-Rayyan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.869.742.868 dan Rp1.860.229.141.715.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**1. Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN)**

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Pada tahun 2017 – 2018, Pemerintah melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Kementerian BUMN telah selesai melakukan inventaris dan penilaian kembali (IP) BMN untuk aset Tanah serta Gedung dan Bangunan, namun secara nasional belum selesai dilaksananan. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, di mana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan Penilaian Kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan Penilaian Kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil Penilaian Kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Namun demikian, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.

Tahun 2018

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018, hasil penilaian kembali BMN seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun, hasil penilaian kembali tersebut diatas belum disajikan pada Laporan Keuangan sampai seluruh objek revaluasi BMN di seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali. Kondisi ini berdampak terhadap perbedaan aset tetap berdasarkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo		Selisih
		Laporan Keuangan	Laporan BMN	
1	Tanah	273.198.404.650	1.307.839.814.000	1.034.641.409.350
2	Gedung dan Bangunan	161.240.853.682	286.899.965.215	125.659.111.533
Total		434.439.258.332	1.594.739.779.215	1.160.300.520.883

Tahun 2019

Pada Tahun 2019 dilakukan perbaikan agar pelaksanaan IP dapat masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2019. Salah satu yang menjadi perhatian BPK-RI adalah pelaksanaan penilaian kembali atas BMN dengan memastikan bahwa inventarisasi telah dilaksanakan dengan benar

dan terverifikasi dengan baik. Pada tahun 2019, Kementerian BUMN telah melakukan verifikasi kembali aset tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang menjadi objek inventarisasi dan penilaian kembali sebagaimana Laporan sebagai berikut:

- a) Laporan Nomor LHIP-716/REV/WKN.7/KNL.05/2019 tanggal 20 November 2019 untuk aset Tanah dan Bangunan Gedung Utama;
- b) Laporan Nomor LHIP-717/REV/WKN.7/KNL.05/2019 tanggal 20 November 2019 untuk aset Gedung 48.

2. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan pencatatan kewajiban atas putusan pengadilan yang inkraht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah inkraht hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

Sampai dengan 31 Desember 2020, tuntutan hukum kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah inkraht adalah putusan hukum dengan Nomor Perkara 341PK/Pdt/2017 dengan pokok gugatan berupa tanah Persekutuan Masyarakat Adat Deli. Atas gugatan tersebut, hasil putusan kasasi menetapkan:

- 1) Tergugat I (PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara - Aceh);
- 2) Tergugat II (PT Kereta Api (Persero) Kantor Pusat di Bandung); dan
- 3) Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00. Nilai tersebut selanjutnya ditanggung renteng oleh ketiga pihak tergugat sehingga masing-masing tergugat memiliki kewajiban kepada penggugat sebesar Rp166.666.667,00.

Namun berdasarkan Putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn dinyatakan bahwa Permohonan Eksekusi aset PT KAI (Persero) di kawasan Pulo Brayan Kota Medan ditangguhkan karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas 40.000 m² (4 Ha) adalah milik Persekutuan Masyarakat Adat Deli (Sultan Deli).
- 2) Perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas kurang lebih 2.910 m² dan bangunan di atasnya seluasnya 180 m² adalah milik PT KAI (Persero).

Dengan kata lain tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017.

PT KAI (Persero) belum melaksanakan hasil putusan yang telah inkraht sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya akan mengupayakan pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sehubungan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn.

3. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian BUMN yang terdiri dari 2 (dua) Wakil Menteri, 1 (satu) Sekretaris Kementerian, 3 (tiga) Deputi, serta 3 (tiga) Staf Ahli. Dalam Peraturan Presiden tersebut, turut diatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pembinaan BUMN, dilakukan klusterisasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN I dan II sebagai berikut:

- a) Wakil Menteri BUMN I: dari 28 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN I, dikelompokkan kedalam 6 kluster sektor industri;
- b) Wakil Menteri BUMN II: dari 107 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II, dikelompokkan kedalam 7 kluster sektor jasa.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha milik negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah

ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

4. Dampak Pandemi Covid-19

Presiden Republik Indonesia pada 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditegaskan kembali melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berakibat pada terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional sehingga berpengaruh terhadap Petunjuk dan Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2020 Kementerian BUMN, termasuk ketidakpastian kemampuan penyerapan anggaran belanja modal tahun 2020 sekiranya kondisi pandemi terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Anggaran belanja modal tahun 2020 mengasumsikan keadaan Covid-19 diperkirakan bersifat sementara sesuai kondisi bencana yang diperkirakan pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun 2020.

Beberapa hal yang sementara ini terkena dampak diantaranya penyesuaian anggaran dan belanja Tahun 2020. Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-302/MK.2/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, Pagu Anggaran Tahun 2020 Kementerian BUMN mengalami pemotongan sebesar Rp79,44 miliar atau sebesar 22,9% dari semula Rp345,83 miliar menjadi Rp266,39 miliar. Penghematan dilakukan terhadap Program Kementerian BUMN melalui sisa anggaran lelang, perjalanan dinas, honor, pemeliharaan dan pendukung kegiatan lainnya. Adapun target penyerapan anggaran pada Tahun 2020 tetap sebesar 95% dari total anggaran dengan penyerapan Belanja Modal di atas 90%. Disamping pemotongan, dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan penyebaran wabah COVID-19 dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp1,81 miliar berupa anggaran dukungan alat perkantoran seperti disinfektan, masker, dll serta aplikasi rapat melalui media daring.

Dari sisi perolehan pendapatan serta realisasi pencairan piutang di masa yang akan datang yang sebagian besar berasal dari *Tenant*, tidak terdapat risiko signifikan terhadap kontrak eksisting mengingat Tenant telah melakukan penyeteroran sewa di awal periode sewa. Disamping itu, sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait norma dan tarif penyisihan piutang. Kementerian BUMN akan tetap menjaga dan mengevaluasi seluruh kemungkinan yang berisiko terhadap operasional Kementerian BUMN sehingga seluruh target akan tetap tercapai di Tahun 2020.

5. Hibah Lampu dan Ornamen Masjid Ar-Rayyan Kementerian BUMN

Pada tahun 2020, dilakukan serah terima hibah antara Majelis Kerohanian Islam (MAKIS) Kementerian BUMN dengan Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam BA-01/KPA.MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Nilai penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam berita acara tersebut adalah Rp2.293.126.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) berupa lampu gantung dan ornamen masjid. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian BUMN mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga nomor 22245/606538/2020 tanggal 31 Desember 2020 kepada KPPN. Hibah telah mendapatkan persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) nomor 1023624019 dari KPPN pada tanggal 31 Desember 2020.

6. Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara dari Barang Rampasan Negara

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-X-559/C/Kpa.5/09/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dalam Perkara a.n. Terpidana Darmawan Tas'an, SE., SH. yang pada intinya telah menetapkan status pengguna Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 830 K/Pid/2006 tanggal 2 November 2006 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/PID/2005/PT.DKI tanggal 2 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1037/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Maret 2005 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Terpidana Darmawan Tas'an, SE., SH, berupa Tanah seluas 346 m2 beserta Bangunan diatasnya gedung kantor plaza pacific Blok B-1/C-1, 3, 5, 7 dengan luas bangunan 1.407,5 m2 yang beralamat di jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan dimanfaatkan/difungsikan sebagai gedung kantor PT Varuna Trita Prakasya (Persero) senilai Rp23.194.600.000 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 19 Oktober tahun 2020, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan dari Kejaksaan Republik Indonesia Kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor B-631.A/K.4/Kpa.5/10/2020. Selanjutnya, dilakukan penilaian aset oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan yang menghasilkan

estimasi nilai Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Barang Rampasan Negara masing-masing sebesar Rp19.869.146.000 dan Rp3.325.454.000.

Berdasarkan estimasi penilaian tersebut, antara UAKPB Kejaksaan Republik Indonesia dengan UAKPB Kementerian BUMN melakukan pemidambukuan aset melalui mekanisme Transfer Keluar-Transfer Masuk di SIMAK-BMN. Kegiatan Transfer Keluar-Transfer Masuk tersebut akan berdampak pada kenaikan nilai Tanah serta Gedung dan Bangunan di Neraca, serta penambahan nilai Transaksi Antar Entitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7. Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Setelah periode pelaporan, terdapat usulan penghapusan melalui penjualan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Nomor S-1/KPB.MBU/01/2021 dan S-4/KPB.MBU/01/2021 tanggal 13 Januari 2020 atas barang milik negara yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.895.683.607 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor BA-01/PHS/2020 tanggal 23 Desember 2020. Penjualan atas Barang Milik Negara tersebut akan dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V. Selanjutnya hasil penjualan tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan diakui sebagai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.

8. Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V atas nama Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.6/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 21 April 2021 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang pada intinya Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang telah menyetujui penghapusan BMN berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Arsip senilai Rp89.950.000. Atas hal tersebut, Menteri BUMN selaku Pengguna Barang akan segera menindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan penghapusan BMN dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan, dan melaporkan penghapusan BMN tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala KPKNL Jakarta V selaku Pengelola Barang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan penetapan penghapusan.

Jakarta, 03 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR